

MODEL REFORMASI PENDIDIKAN EKONOMI MENUJU PENDIDIKAN BERKARAKTER

Caska

Pusat Penelitian Kependudukan/Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP
Universitas Riau
e-mail: riodirgantoro@yahoo.com

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi model implementasi pemecahan masalah untuk meningkatkan kompetensi peserta didik SMA. Penelitian ini dilakukan melalui survey dengan metode deskriptif (*Descriptive Research*) pada 36 Sekolah Menengan Atas (SMA) di 12 Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Riau. Hasilnya menunjukkan bahwa model rumusan alternatif pemecahan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik (nilai ujian nasional) adalah: (1) Perbaikan dalam pelaksanaan Komponen 2: Standar Proses; (3) Perbaikan dalam pelaksanaan Komponen 4: Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (5) Perbaikan dalam pelaksanaan Komponen.

Kata Kunci: *mutu pendidikan, reformasi pendidikan, ujian nasional.*

ABSTRACT: The aim of this research was to identify solving problem technique to improve the competence of students in Senior High School. Data were collected by using survey and descriptive research in 36 Senior High School in 12 regencies, Riau Province. The results of this study showed solving problem technique to improve students' competence were: (1) Repairing in components; (2) Standard process. 3) The standard of educational management. (4) The standard of educational and educator. (5) The improvement of implementation component.

Keywords: *Educational Quality, educational reform, state exam.*

PENDAHULUAN

Pembangunan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia telah ditetapkan melalui Masterplan Pendidikan Riau 2020, di mana sektor pendidikan telah dirumuskan 6 persoalan dasar pendidikan (Dinas Pendidikan Provinsi Riau, 2001), yaitu: 1) Terdapatnya penduduk usia 7-12, 13-15, dan 16-18 tahun yang belum tertampung di bangku sekolah serta masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan; 2) Rendahnya mutu pendidikan, kualitas lulusan yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar dan lemahnya manajemen pengelolaan sekolah; 3) Belum relevannya pengembangan program

studi pendidikan tinggi dengan potensi, investasi, dan pasar; 4) Masih adanya anak usia sekolah buta huruf, putus sekolah, dan *drop out*; 5) Rendahnya minat baca masyarakat dan terbatasnya jangkauan pelayanan perpustakaan sampai kecamatan/desa serta terbatasnya pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan; dan 6) Terbatasnya pengalaman, pemahaman nilai budaya daerah.

Sehubungan dengan persoalan di atas, dirumuskan 13 sasaran utama pembangunan pendidikan di Riau. Sasaran tersebut secara rinci dijabarkan sebagai berikut, yaitu: 1) Meningkatkan pemerataan pendidikan di semua jenjang; 2) Meningkatkan fasilitas prasarana dan sarana pendidikan sekolah dan luar sekolah; 3) Mengembangkan sekolah berwawasan keunggulan di semua jenjang pendidikan; 4) Meningkatkan kualitas di semua jenjang pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidikan; 5) Meningkatkan manajemen pendidikan; 6) Mengembangkan kebudayaan Melayu di sekolah; 7) Mengembangkan pendidikan tinggi yang berwawasan sains dan teknologi; 8) Meningkatkan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 9) Pengembangan semua jenis perpustakaan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat Propinsi Riau; 10) Melakukan dan meningkatkan kerjasama di semua jenjang pendidikan di dalam dan di luar negeri; 11) Meningkatkan peranserta masyarakat dalam dunia usaha di bidang pendidikan; 12) Melestarikan peninggalan sejarah dan budaya; dan 13) Meningkatkan pengamalan beragama di semua jenjang pendidikan (Dinas Pendidikan Provinsi Riau, 2001).

Masyarakat senantiasa berkembang dari masa ke masa, hal ini memaksa setiap bangsa untuk bekerja keras mengejar ketinggalannya dalam segala bidang seiring dengan semakin cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumberdaya manusia yang berkualitas, dalam pengertian mempunyai sifat inovatif-kreatif serta menguasai iptek dan informasi secara memadai adalah kunci untuk menjawab berbagai tantangan baru yang lebih berat sehubungan dengan hadirnya era globalisasi dan informasi.

Pada era globalisasi dan informasi menuntut perubahan yang cepat dan mendasar di berbagai aspek kehidupan, baik aspek politik, sosial, ekonomi dan budaya. Perubahan tersebut mengarah pada pengembangan nilai-nilai demokrasi,

otonomi dan transformasi yang berlaku di semua bidang, termasuk bidang pendidikan. Bidang pendidikan yang dijadikan sebagai sarana yang efektif adalah pendidikan sekolah. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengatur sistem pendidikan nasional dan implementasinya yang menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Sistem pendidikan nasional harus terus dikaji ulang dalam sistem kehidupan di masyarakat. Memasuki era millenium ketiga, justru kita sedang berada dalam kondisi terpuruk, akibatnya kurang mapannya sistem pendidikan selama ini. Berbagai kelemahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sistem yang dimiliki harus senantiasa memperbaiki sistem yang dimiliki dengan memacu pada tujuan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (*civil society*). Sistem pendidikan harus mengalami penyesuaian mengikuti "trend" ke arah pembentukan masyarakat yang lebih mandiri, merdeka dan sedikit ketergantungan terhadap birokrasi. Peranan birokrasi yang selama ini begitu dominan diwarnai sistem pendidikan nasional tentu secara perlahan-lahan harus diubah, salah satunya dengan menghilangkan sistem sentralisasi pendidikan secara bertahap. Dengan demikian maka diperlukan paradigma baru pendidikan.

Sistem pendidikan nasional yang berlaku saat ini memiliki banyak kekurangan baik dari segi muatan, pengelolaan, maupun arah kebijakan. Untuk itu diperlukan reformasi yang cukup mendasar terhadap pendidikan yang lebih baik. Pemerintah harus melakukan reformasi di bidang pendidikan. Tanpa pembaharuan sistem secara mendasar, tidak mungkin perubahan akan terjadi. Kini tidak lagi waktunya membebaskan pendidikan hanya pada sekolah. Sudah saatnya institusi masyarakat menjadi institusi pendidikan, sehingga institusi pendidikan tidak berarti hanya sekolah saja tetapi juga keluarga dan masyarakat.

Ada 10 paradigma baru pendidikan yang ditawarkan oleh Ace Suryadi (2002), yaitu: 1) pendidikan adalah proses pembebasan; 2) pendidikan adalah sebagai proses pencerdasan; 3) pendidikan menjunjung tinggi hak anak; 4) pendidikan menghasilkan tindak perdamaian; 5) pendidikan adalah proses pemberdayaan potensi manusia; 6) pendidikan menjadikan anak berwawasan integrif; 7) pendidikan menjadi wahana membangun watak persatuan; 8)

pendidikan menghasilkan manusia demokratis; 9) sekolah menghasilkan manusia yang peduli lingkungan; dan 10) sekolah instrument pendidikan.

Dari pendapat di atas maka paradigma baru untuk bidang pendidikan adalah pendidikan yang mengacu pada tuntutan globalisasi yang bercirikan kebebasan dalam pengembangan potensi, bersifat demokratis dalam pengelolaan pelaksanaannya, memperhatikan keseimbangan dan terintegrasi dengan pendidikan rohaniah sehingga perlu penanganan pendidikan yang melibatkan berbagai komponen masyarakat.

Provinsi Riau di masa persaingan global memerlukan sumberdaya manusia (SDM) paripurna. Manusia yang cerdas, sehat, jujur, berakhlak mulia, berkarakter, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Pendidikan sebagai jalur utama pengembangan SDM dan pembentukan karakter adalah kata kunci dalam menentukan nasib bangsa. Upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia telah lama dilakukan. Pada setiap rencana pembangunan jangka panjang dan menengah selalu tercantum bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan di bidang pendidikan. Berbagai inovasi dan program pendidikan juga telah dilaksanakan, antara lain penyempurnaan kurikulum, pengadaan buku ajar, peningkatan mutu guru dan tenaga pendidikan lainnya, peningkatan manajemen pendidikan, serta pengadaan fasilitas lainnya.

Hasil ujian nasional untuk matakuliah ekonomi dari tahun 2006/2007 sampai dengan 2009/2010 dapat dilihat pada Tabel 1. berikut ini:

Tabel 1: Rerata Hasil Mata Ujian Nasional Matakuliah Ekonomi

Tahun	Wilayah	Ekonomi
2007/2008	Provinsi Riau	7.68
	Nasional	7.67
2008/2009	Provinsi Riau	7.91
	Nasional	7.36
2009/2010	Provinsi Riau	7.48
	Nasional	7.01

Sumber:BSNP Tahun 2011

Provinsi Riau untuk mata ujian Ekonomi dari tahun 2006/2007 sampai dengan 2009/2010 telah dapat melebihi rerata tingkat nasional dengan persentase tingkat kelulusan sebesar 96,73% dan ketidak lulusan sebesar 3,26%. Memperhatikan fakta di lapangan menunjukkan bahwa mata ujian ekonomi di Provinsi Riau masih di atas perolehan Nasional.

Namun dari sisi perilaku keseharian siswa, juga banyak terjadi ketidakpuasan masyarakat. Dari dunia usaha muncul keluhan bahwa lulusan yang memasuki dunia kerja belum memiliki kesiapan kerja yang baik. Ketidakpuasan berjenjang juga terjadi, yaitu kalangan SMP merasa bekal lulusan SD kurang baik untuk memasuki SMP dan kalangan SMA merasa lulusan SMP tidak siap mengikuti pembelajaran di sekolah menengah atas. Begitu pula, kalangan perguruan tinggi merasa bekal lulusan SMA belum cukup untuk mengikuti perkuliahan.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap mutu pendidikan khususnya pendidikan ekonomi dapat dilihat dari perilaku lulusan di berbagai tingkatan tidak memperlihatkan perilaku ekonomi. Hasil pendidikan yang dicerminkan dengan hasil ujian nasional hanya sebatas hasil ranah kognitif saja. Sementara ranah afektif dan psikomotorik nyaris tidak tersentuh.

Bedasarkan fenomena tersebut banyak upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di antaranya melalui pendidikan berkarakter. Semua pihak perlu turut bertanggung jawab secara moral apa yang harus dilakukan, dan terobosan apa yang harus dijalankan, sehingga secepatnya dapat terjadi peningkatan mutu pendidikan.

Berdasarkan permasalahan di atas maka identifikasi masalahnya adalah: (1) Bagaimana rumusan alternatif pemecahan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik SMA di Provinsi Riau ? (2) Bagaimana model implementasi pemecahan masalah dengan menyertakan berbagai institusi terkait ?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui survey dengan metode deskriptif (*Descriptive Research*). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencanderaan secara sistimatis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini bertumpu pada latar belakang masalah untuk menjawab identifikasi penelitian yang dilakukan.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada 36 Sekolah Menengan Atas (SMA) di 12 Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Riau.

Teknik Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui wawancara, semuanya dicatat sebagai catatan lapangan. Wawancara mendalam (*indeph interview*) dilakukan untuk mengungkap nilai-nilai, norma-norma, kebiasaan, pola pikir, anggapan, dan bagaimana individu memainkan peranannya sesuai dengan lingkungannya, tidak terikat oleh daftar pertanyaan yang dipersiapkan sehingga wawancara dilakukan berdasarkan pada topik permasalahan. Wawancara dilakukan terhadap setiap informan dengan frekuensi yang tidak sama antara informan satu dengan yang lainnya, karena tergantung pada kesiapan dari setiap informan. Wawancara mendalam, untuk mendapatkan data yang lebih luas dilakukan secara intensif terhadap sejumlah informan kunci.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi serta terbatas. Pengamatan di lapangan adalah langsung dengan mengamati proses belajar mengajar di sekolah, kemudian mencatat perilaku dari kejadian tersebut. Dengan memanfaatkan jasa informan pangkal, peneliti akan lebih mudah untuk memahami interaksi mereka dengan berbagai latar belakangnya, mendengarkan apa yang direncanakannya dan bagaimana memecahkan masalah serta harapan mereka. Di samping itu, peneliti juga menyebarkan kuesioner untuk disisi pihak sekolah dan pihak birokrasi pendidikan.

Analisis Data Penelitian

Analisis data penelitian menggunakan SPSS Versi 18 khususnya Analisis Korelasi antara Variabel independen dengan variabel dependen sehingga akan ditemukan akar permasalahan untuk digunakan sebagai dasar untuk pengembangan program peningkatan mutu sesuai kondisi lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Delapan variabel yang dihitung secara statistik menggunakan SPSS Versi 18 hubungannya dengan variabel hasil nilai Ujian Nasional ternyata hanya 3 (tiga) variabel saja yang hubungannya signifikan (Caska dkk, 2001), yaitu:

- 1) Variabel Komponen Standar Proses: Terdapat korelasi positif signifikan antara Variabel Komponen Standar Proses dengan variabel Nilai Ujian Nasional. Koefisien korelasi antara Variabel Komponen Standar Proses dengan variabel Nilai Ujian Nasional sebesar 0,806.
- 2) Variabel Komponen Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Terdapat korelasi positif signifikan antara Variabel Komponen Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan variabel Nilai Ujian Nasional. Koefisien korelasi antara Variabel Komponen Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan variabel Nilai Ujian Nasional sebesar 0,817.
- 3) Variabel Komponen Standar Pengelolaan: Terdapat korelasi positif signifikan antara Variabel Komponen Standar Pengelolaan dengan variabel Nilai Ujian Nasional. Koefisien korelasi antara Variabel Komponen Standar Pengelolaan dengan variabel Nilai Ujian Nasional sebesar 0,843.

Komponen 2: Standar Proses Pendidikan mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel Nilai Ujian Nasional sebesar 0,806. Hal ini dapat dimaklumi mengingat pembelajaran semua bidang studi tiap semester didukung oleh silabus. Akan tetapi silabus yang ada masih belum dimanfaatkan dalam pengembangan RPP oleh guru. Pelaksanaan pembelajaran belum mengacu sepenuhnya kepada RPP. Guru yang mengajar pada SMA yang mendapat nilai UN tinggi sudah ada variasi pengembangan RPP bila dibandingkan dengan guru yang ada pada SMA yang Nilai UN rendah. Namun sayangnya baik guru yang mendapatkan nilai UN tinggi maupun rendah belum menganggap penting RPP

sebagai dokumen yang berfungsi dalam peningkatan kualitas pembelajaran yang bisa meningkatkan nilai UN sekolah.

Di samping itu, ada perbedaan pemantauan atas proses pembelajaran di SMA yang memperoleh UN tinggi dan rendah. Bagi SMA yang mendapat nilai UN tinggi, pemantauan dilakukan 2-4 kali pemantauan dan dilakukan diskusi dengan guru tetapi bagi SMA yang mendapat nilai UN rendah, pemantauan dilakukan hanya sekali dan tidak melakukan diskusi. Hal ini terjadi karena sekolah yang nilai UN rendah sekolah baru yang letaknya di pedesaan sehingga gurunya guru honorer dan minim pengalaman.

Implementasi tindak lanjut hasil supervisi baik SMA UN tinggi maupun SMA UN rendah sama-sama tidak ada tindak lanjutnya karena keterbatasan inovasi kepala sekolah dalam menggali dana-dana operasional sehingga tidak ada program inovasi dalam upaya peningkatan nilai UN terkecuali kegiatan insidental menjelang UN seperti tambahan jam pelajaran untuk membahas soal-soal UN tahun terdahulu.

Pendekatan pembelajaran di SMA UN tinggi maupun UN rendah masih terpusat pada pembelajaran behavioristik belum mengembangkan pembelajaran yang konstruktif. Hal ini terkait dengan belum biasanya guru dalam pembelajaran konstruktif yang membutuhkan kreativitas dari guru dalam membuat skenario pembelajaran. Model pembelajaran masih terpusat pada model ceramah yang tidak menarik dan sangat jarang menggunakan *cooperative learning*. Media yang digunakan masih sangat terbatas pada media tradisional seperti papan tulis dan spidol saja.

Ada perbedaan yang sangat nyata antara SMA yang mendapat nilai UN tinggi dengan SMA yang mendapat nilai UN rendah. SMA yang mendapat nilai UN tinggi gurunya sudah memanfaatkan IT (*computer* dan *infocus*) dalam pembuatan media, tidak dilakukan bagi SMA yang mendapat UN rendah. Hal ini ada kaitannya dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah.

Komponen 4: Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel Nilai Ujian Nasional sebesar 0,817. Hal ini dapat dimaklumi mengingat ada perbedaan kualifikasi akademik bagi

SMA yang mendapat nilai UN tinggi dan UN rendah. Kualifikasi Akademik SMA yang mendapat nilai UN tinggi rata-rata sudah berizazah S1/D4 bahkan ada beberapa guru yang sudah berizazah S2. Sementara kualifikasi akademik SMA yang mendapat nilai UN rendah rata-rata di bawah ijazah S1/D4. Hal ini terkait dengan akses untuk mendapatkan pendidikan, SMA yang mendapat nilai UN tinggi terletak di perkotaan sementara SMA yang mendapat nilai UN rendah ada di pedesaan yang jauh dari akses untuk melanjutkan pendidikan formal.

Di samping itu, ada perbedaan kesesuaian mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikan bagi SMA yang mendapat nilai UN tinggi dan UN rendah. Tingkat kesesuaian mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikan SMA yang mendapat nilai UN tinggi rata-rata mendekati kesesuaian. Sementara tingkat kesesuaian mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikan SMA yang mendapat nilai UN rendah banyak yang tidak sesuai. Hal ini terkait dengan pemerataan penyebaran guru antara yang ada di kota dengan yang ada di desa. Di samping itu, kesenjangan ini juga diakibatkan oleh perilaku guru yang cenderung kalau sudah menjadi PNS bercita-cita dan ingin mutasi ke daerah kota.

Hal lain yang menyebabkan adanya hubungan adalah ada perbedaan penguasaan guru terhadap materi pelajaran serta pola pikir keilmuan pada SMA yang mendapat nilai UN tinggi dan UN rendah. Penguasaan guru terhadap materi pelajaran serta pola pikir keilmuan SMA yang mendapat nilai UN tinggi rata-rata menguasai dengan baik. Sementara penguasaan guru terhadap materi pelajaran serta pola pikir keilmuan SMA yang mendapat nilai UN rendah rata-rata menguasai cukup baik.

Hal yang menggembirakan dari hasil penelitian ini ternyata tidak ada perbedaan tingkat kehadiran guru pada SMA yang mendapat nilai UN tinggi dan UN rendah. Berdasarkan hasil wawancara tingkat kehadiran guru antara 80% sampai dengan 100%. Hal lain yang menggembirakan adalah tidak ada perbedaan tingkat integritas guru terkait kepribadian dan tindakan yang sesuai dengan norma-norma agaman, hukum, sosial, serta peraturan yang berlaku guru pada SMA yang mendapat nilai UN tinggi dan UN rendah. Berdasarkan hasil

wawancara tingkat integritas guru terkait kepribadian dan dan tindakan yang sesuai dengan norma-norma agama, hukum, sosial, serta peraturan yang berlaku selalu sesuai dengan ketentuan.

Komponen 6: Variabel Standar Pengelolaan Pendidikan mempunyai hubungan yang signifikan dengan dengan variabel Nilai Ujian Nasional sebesar 0,843. Hal ini dapat dimaklumi mengingat ada perbedaan antara sekolah yang memperoleh UN tinggi dengan UN rendah dalam pengelolaan pendidikan. Hal-hal yang membedakan di antaranya, yaitu: 1). Sekolah yang mendapat nilai UN tinggi, Visi, misi, dan tujuan sekolah mudah dipahami dan disosialisasikan sedangkan Sekolah yang mendapat nilai UN rendah, Visi , misi, dan tujuan sekolah sulit dipahami serta tidak disosialisasikan; 2). Sekolah yang mendapat nilai UN tinggi, Sekolah merumuskan rencana kerja tahunan maupun yang berjangka menengah dan disosialisasikan sedangkan Sekolah yang mendapat nilai UN rendah, Sekolah merumuskan rencana kerja tahunan dan disosialisasikan, namun tidak merumuskan rencana kerja berjangka menengah; 3). Sekolah yang mendapat nilai UN tinggi, Terdapat struktur organisasi yang memperhatikan kejelasan tugas sedangkan Sekolah yang mendapat nilai UN rendah, tidak terdapat struktur organisasi yang memperhatikan kejelasan tugas; 4). Sekolah yang mendapat nilai UN tinggi, Sekolah merumuskan pedoman tertulis yang mengatur berbagai aspek pengelolaan sedangkan Sekolah yang mendapat nilai UN rendah, Sekolah tidak merumuskan pedoman tertulis yang mengatur berbagai aspek pengelolaan.

Di samping itu, perbedaan lain dalam hal program kerja dan sistem informasi manajemen, yaitu: 1). Sekolah yang mendapat nilai UN tinggi, Kegiatan sekolah sesuai dengan RKT sedangkan Sekolah yang mendapat nilai UN rendah, kegiatan sekolah sesuai dengan RKT; 2). Sekolah yang mendapat nilai UN tinggi, Sekolah memiliki dan melaksanakan > 1 program pengelolaan kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran sedangkan Sekolah yang mendapat nilai UN rendah, Sekolah memiliki dan melaksanakan 1 program pengelolaan kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran; 3). Sekolah yang mendapat nilai UN tinggi, Sekolah memiliki dan melaksanakan > 1 kegiatan yang dapat

menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif sedangkan Sekolah yang mendapat nilai UN rendah, Sekolah tidak memiliki kegiatan yang dapat menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif; dan 4). Sekolah yang mendapat nilai UN tinggi, Sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi pendidikan baik sedangkan Sekolah yang mendapat nilai UN rendah, Sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi pendidikan tidak baik.

Walaupun secara statistik hanya tiga komponen standar Pendidikan yang berkorelasi secara signifikan dengan nilai Ujian Nasional. Akan tetapi lima komponen lain pun perlu mendapatkan perhatian dalam meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Riau. Temuan hasil penelitian yang berkaitan dengan Komponen 1: Standar Isi Pendidikan, yaitu: Semua guru dalam mata pelajaran telah menggunakan pembelajaran pada KTSP. Namun pada implementasi KTSP ada perbedaan, bagi sekolah yang memperoleh Nilai UN yang tinggi Guru melakukan pengembangan dalam penyusunan silabus maupun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Akan tetapi sekolah yang Nilai UN rendah belum melakukan pengembangan baik silabus maupun RPP. Hal yang menarik berdasarkan data di lapangan baik sekolah yang mendapat nilai UN tinggi maupun nilai UN rendah sama-sama memperlakukan Silabus dan RPP sebatas tugas dan kewajiban guru saja belum dijadikan sebagai tugas dan fungsi perencanaan pembelajaran. Bila fenomena ini ditanya lebih lanjut, ternyata faktor pengalaman mempengaruhi perilaku guru. Guru yang pengalaman mengajarnya tinggi akan melakukan pengembangan silabus maupun RPP tetapi yang belum berpengalaman silabus dan RPP nya relatif belum berkembang.

Temuan dalam penelitian yang berkaitan dengan komponen 3: Standar Kompetensi Lulusan, yaitu: 1). Ada perbedaan rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran di SMA yang mendapat nilai UN tinggi dan SMA yang mendapat nilai UN rendah. Bagi SMA yang mendapat nilai UN tinggi, rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran di atas 80 sedangkan SMA yang mendapat nilai UN rendah yaitu rata-rata nilai ketuntasan belajar di bawah 70; dan 2). Ada perbedaan pengalaman belajar melalui program pembiasaan mencari informasi

lebih dari berbagai sumber belajar. Bagi SMA yang mendapat nilai UN tinggi, pengalaman belajar melalui program pembiasaan mencari informasi lebih dari berbagai sumber belajar seperti internet dan mengikuti bimbingan belajar baik oleh guru maupun lembaga di luar sekolah sedangkan SMA yang mendapat nilai UN rendah hanya mendapatkan informasi dari sekolah.

Sementara itu, temuan yang berkaitan dengan komponen 5: Standar Sarana dan Prasarana, yaitu: 1). Ada perbedaan kesesuaian buku teks pelajaran sesuai dengan permendiknas pada SMA yang mendapat nilai UN tinggi dan UN rendah. Kesesuaian buku teks pelajaran sesuai dengan permendiknas pada SMA yang mendapat nilai UN tinggi rata-rata sudah sesuai. Sementara kesesuaian buku teks pelajaran sesuai dengan permendiknas pada SMA yang mendapat nilai UN rendah rata-rata ada beberapa yang belum sesuai. Hal ini disebabkan karena terbatasnya buku teks yang disediakan oleh sekolah sedangkan pihak siswa pun tidak memenuhi keputusan buku yang diperlukan; dan 2). Ada perbedaan pemanfaatan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas pada SMA yang mendapat nilai UN tinggi dan UN rendah. Pada SMA yang mendapat nilai UN tinggi rata-rata mata pelajaran memanfaatkan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan permendiknas, maupun buku teks yang lainnya. Sementara pada SMA yang mendapat nilai UN rendah rata-rata ada beberapa yang belum memanfaatkan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya buku teks yang disediakan oleh sekolah sedangkan pihak siswa pun tidak memenuhi kebutuhan buku yang diperlukan. Di samping itu, guru belum bisa mendorong siswa untuk memanfaatkan buku-buku teks.

Temuan yang berkaitan dengan komponen 8: Standar Penilaian, yaitu: 1). Tidak ada perbedaan baik SMA yang mendapat nilai UN tinggi maupun rendah, keduanya tidak terdapat informasi rancangan kriteria penilaian pada silabus disampaikan kepada para siswa di awal semester; 2). Terdapat perbedaan tingkat kesesuaian teknik penilaian pada silabus dengan indikator pencapaian KD antara SMA yang mendapat nilai UN tinggi dengan maupun UN rendah. Untuk SMA yang mendapat nilai UN tinggi, teknik penilaian pada silabus sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dasar. Sedangkan SMA yang mendapat nilai UN

rendah, teknik penilaian pada silabus kurang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dasar. Hal ini disebabkan oleh pemahaman guru dalam mengembangkan perangkat perencanaan pembelajaran; 3) Terdapat perbedaan tingkat Kesesuaian instrumen dan pedoman penilaian dengan bentuk dan teknik penilaian antara SMA yang mendapat nilai UN tinggi dengan maupun UN rendah. Untuk SMA yang mendapat nilai UN tinggi, Instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian. Sedangkan SMA yang mendapat nilai UN rendah, Instrumen dan pedoman penilaian kurang sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian. Hal ini disebabkan oleh kekurangmahiran guru dalam mengembangkan perangkat perencanaan pembelajaran khususnya teknik penilaian; 4). Terdapat perbedaan macam asesmen antara SMA yang mendapat nilai UN tinggi dengan maupun UN rendah. Untuk SMA yang mendapat nilai UN tinggi, Semua jenis asesmen tergolong asesmen autentik. Sedangkan SMA yang mendapat nilai UN rendah, Sebagian jenis asesmen tergolong asesmen autentik dan sebagian lagi asesmen non autentik; 5). Terdapat perbedaan tentang balikan hasil kerja siswa disertai masukan/komentar yang mendidik pada SMA yang mendapat nilai UN tinggi dengan maupun UN rendah. Untuk SMA yang mendapat nilai UN tinggi, Guru selalu memberikan balikan hasil kerja siswa disertai masukan/komentar yang mendidik. Sedangkan SMA yang mendapat nilai UN rendah, Guru sering memberikan balikan hasil kerja siswa disertai masukan/komentar yang mendidik; 6). Terdapat perbedaan tentang pemanfaatan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran pada SMA yang mendapat nilai UN tinggi dengan maupun UN rendah. Untuk SMA yang mendapat nilai UN tinggi, Guru mata pelajaran selalu memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. Sedangkan SMA yang mendapat nilai UN rendah, Guru mata pelajaran sering memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran; 7). Terdapat perbedaan tentang Pemantauan tingkat kelulusan UN pada SMA yang mendapat nilai UN tinggi dengan maupun UN rendah. Untuk SMA yang mendapat nilai UN tinggi, Selalu dilakukan pemantauan tingkat kelulusan UN. Sedangkan SMA yang mendapat nilai UN rendah, Sering dilakukan pemantauan tingkat kelulusan UN; dan 8). Terdapat perbedaan tentang prestasi kelulusan UN

sekolah dalam perbandingan dengan rata-rata kelulusan UN Nasional tahun terakhir pada SMA yang mendapat nilai UN tinggi dengan maupun UN rendah. Untuk SMA yang mendapat nilai UN tinggi, hasil mata pelajaran yang diujikan selalu lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata mata pelajaran nasional. Sedangkan SMA yang mendapat nilai UN rendah, Hasil mata pelajaran yang diujikan, sering lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata mata pelajaran nasional.

Alternatif Pemecahan Masalah Dalam Upaya Peningkatan Nilai Ujian Nasional Pada Mata Pelajaran yang Di-UN-kan

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya peningkatan nilai ujian nasional (Caska dkk, 2001), di antaranya adalah:

1). Komponen 2: Standar Proses

- Agar silabus yang ada dimanfaatkan dalam pengembangan RPP oleh guru dan pelaksanaan pembelajaran mengacu sepenuhnya kepada RPP maka diperlukan perbaikan sistem supervisi yang dilakukan oleh Kepala Sekolah. Sistem perbaikan supervisi yang dimaksud adalah penentuan target harian, mingguan, bulanan, dan semesteran harus ditentukan serta dimonitoring dan evaluasi secara kontinyu. Bagi guru yang memenuhi target dan kinerjanya baik harus mendapatkan promosi, sebaliknya guru yang tidak memenuhi target dan kinerjanya kurang baik harus diberikan demosi. Ini penting untuk meningkatkan motivasi kerja para guru.
- Pemantauan atas proses pembelajaran mempunyai pengaruh terhadap perolehan hasil UN. Oleh karenanya, guru berkewajiban untuk melakukan pemantauan minimal 4 kali pemantauan selama satu semester dan dilakukan diskusi dengan sesama guru baik tingkat sekolah maupun tingkat kabupaten/kota untuk mengevaluasi hasil pemantauan prestasi siswa.
- Implementasi tindak lanjut hasil supervisi sangat penting untuk dilakukan. Kenyataan di lapangan hasil supervisi tidak ada tindak lanjutnya. Oleh karena itu, diperlukan kreativitas kepala sekolah dalam menggali dana

operasional sehingga program peningkatan kualitas pendidikan SMA tidak terhambat.

- Agar pendekatan pembelajaran di SMA mengembangkan pembelajaran yang konstruktif maka diperlukan peningkatan kreativitas dari guru dalam membuat skenario pembelajaran yang konstruktif. Kemampuan dan kemahiran guru dalam mengembangkan pembelajaran yang konstruktif dijadikan salah satu indikator penilaian kinerja guru. Hal ini penting agar guru termotivasi dan dituntut untuk mengembangkan diri.
- Pemanfaatan IT (*computer dan infocus*) dalam pembuatan media oleh guru sangat membantu siswa dalam memahami materi. Kenyataan di lapangan terutama sekolah-sekolah yang perolehan nilai UN rendah sangat terbatas dalam pemanfaatan IT (*computer dan infocus*) dalam pembuatan media oleh guru. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana terutama IT perlu perhatian yang serius oleh kepala sekolah dan komite sekolah.

2). Komponen 4: Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- Kualifikasi Akademik bagi guru SMA berpengaruh terhadap perolehan nilai UN. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk membuat program percepatan agar semua guru SMA minimal S1/Diploma IV.
- Kesesuaian mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikan bagi guru SMA berpengaruh terhadap perolehan nilai UN. Oleh karena itu, Tingkat kesesuaian mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikan guru SMA perlu menjadi perhatian.
- Penguasaan guru terhadap materi pelajaran serta pola pikir keilmuan berpengaruh terhadap perolehan nilai UN. Oleh karena itu, Manajemen Sekolah dan Komite sekolah perlu punya program yang kontinyu untuk meningkatkan kapasitas guru dalam pemahaman materi . Salah satu program yang perlu dipertimbangkan di antaranya adalah pengikutsertakan pelatihan dan kegiatan ilmiah serta kegiatan MGMP perlu direvitalisasi.

- Guru harus mengembangkan model pembelajaran interaktif dan inovatif sehingga pembelajaran tidak membosankan. Diharapkan siswa bukan hanya memahami materi dari sisi kognitif tetapi siswa mampu memahami materi dari sisi afektif dan perilaku .

3). Komponen 6: Standar Pengelolaan Pendidikan

- Sekolah harus melakukan sosialisasi terhadap visi, misi, dan tujuan sekolah agar mudah dipahami oleh seluruh warga sekolah.
- Sekolah harus merumuskan rencana kerja tahunan maupun yang berjangka menengah dan disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah.
- Sekolah harus membuat struktur organisasi yang memperhatikan kejelasan tugas masing-masing departemen dan disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah.
- Sekolah harus merumuskan pedoman tertulis yang mengatur berbagai aspek pengelolaan.
- Kegiatan sekolah harus sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).
- Sekolah harus memiliki dan melaksanakan > 1 program pengelolaan kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran.
- Sekolah harus memiliki dan melaksanakan > 1 kegiatan yang dapat menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.
- Sekolah harus memiliki Sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi pendidikan baik.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Riau, di samping perbaikan terhadap tiga komponen yang berkorelasi dengan nilai ujian nasional yang telah dibahas, juga harus memperhatikan perbaikan berdasarkan temuan penelitian (Caska dkk, 2001), di antaranya adalah:

1) Komponen 1: Standar Isi

- Agar implementasi KTSP pada mata pelajaran dapat dilaksanakan oleh guru khususnya dalam pengembangan penyusunan silabus maupun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) maka diperlukan sistem penilaian kinerja guru berdasarkan prestasi. Kegiatan perencanaan pembelajaran dalam mengembangkan silabus dan RPP harus

diperhitungkan ke dalam beban kewajiban kerja guru (minimal 24 Jam pelajaran per minggu). Ini penting, mengingat selama ini pengembangan perencanaan merupakan kewajiban tetapi kompensasinya tidak diperhitungkan. Berbeda dengan PNS non guru, pekerjaan yang dikerjakan di luar jam dinas diperhitungkan dalam honor lembur.

2). Komponen 3: Standar Kompetensi Lulusan

- Program pembiasaan mencari informasi lebih dari berbagai sumber belajar seperti internet dan mengikuti bimbingan belajar baik oleh guru maupun lembaga di luar sekolah berpengaruh terhadap perolehan nilai UN SMA. Oleh karena itu, Kepala sekolah dan guru harus menciptakan kondisi yang kondusif agar para siswa mempunyai akses dalam mencari informasi lebih dari berbagai sumber belajar. Salah satu program yang bisa dipertimbangkan adalah guru memberikan tugas terstruktur dalam bentuk pekerjaan rumah pada setiap tatap muka.

3). Komponen 5: Standar Sarana dan Prasarana

- Kesesuaian dan pemanfaatan buku teks pelajaran sesuai dengan permendiknas pada SMA berpengaruh terhadap perolehan nilai UN. Oleh karena itu, Kepala sekolah dan Komite Sekolah perlu menyediakan buku teks pelajaran sesuai dengan permendiknas untuk setiap siswa.
- Laboratorium perlu dirintis dan diadakan agar siswa dapat memahami materi dari aspek afektif dan psikomotor.

4). Komponen 8: Standar Penilaian

- Guru harus menyampaikan dan menginformasi rancangan kriteria penilaian pada silabus kepada para siswa di awal semester. Hal ini penting agar para siswa mengetahui tujuan pembelajaran yang diikutinya.
- Guru harus mengupayakan kesesuaian teknik penilaian pada silabus dengan indikator pencapaian KD. Hal ini penting agar evaluasi yang dilakukan oleh guru sesuai dengan tujuan pembelajaran.
- Guru harus mengupayakan Instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian.

- Guru harus mengupayakan semua jenis asesmen tergolong asesmen autentik.
- Guru harus selalu memberikan balikan hasil kerja siswa disertai masukan/komentar yang mendidik.
- Guru mata pelajaran harus selalu memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
- Guru mata pelajaran harus selalu melakukan pemantauan tingkat kelulusan UN.

4.4. Model Pemecahan Masalah Dalam Upaya Peningkatkan Nilai Ujian Nasional

Kebijakan

Perlu dilakukan reformasi kebijakan dalam penilaian kinerja guru terutama memasukan kegiatan perencanaan pembelajaran merupakan tugas pokok yang tak terpisahkan sehingga kegiatannya diperhitungkan dalam menentukan tugas minimal 24 jam per minggu.

Manajemen Sekolah

Dalam mengimplementasikan Sistem perbaikan supervisi kegiatan guru perlu dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan pemberdayaan dan pendampingan guru dan manajemen sekolah dalam bentuk model sekolah binaan dalam kegiatan perencanaan pembelajaran, model supervisi kegiatan guru, dan kemahiran penelitian tindakan kelas.

Guru Bidang Studi

Khusus untuk guru perlu dilakukan pemberdayaan dan pendampingan dalam bentuk model sekolah binaan dalam rangka peningkatan pemahaman materi yang perolehan nilai UN rendah.

Sarana dan Prasarana

- Kepala sekolah dan Komite Sekolah perlu menyediakan buku teks mata pelajaran sesuai dengan permendiknas untuk setiap siswa.
- Laboratorium setiap mata pelajaran perlu dirintis dan diadakan agar siswa dapat memahami materi bukan hanya pada aspek kognitif tetapi pada aspek afektif dan psikomotor.
- Kepala sekolah dan Komite Sekolah perlu menyediakan perangkat IT (*computer dan infocus*) dalam pembuatan media oleh guru.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

- 1) Faktor penyebab sehingga peserta didik di Provinsi Riau tidak menguasai pokok bahasan tertentu, yaitu: (1) Variabel Komponen Standar Proses; (2) Variabel Komponen Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan (3). Variabel Komponen Standar Pengelolaan.
- 2) Rumusan alternatif pemecahan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik (nilai ujian nasional) adalah: (1) *Komponen 2: Standar Proses*: perbaikan sistem supervisi yang dilakukan oleh Kepala Sekolah, pemantauan atas proses pembelajaran secara kontinyu dan berkesinambungan, implementasi tindak lanjut hasil supervisi, mengembangkan pembelajaran yang konstruktif, dan pemanfaatan IT (*computer dan infocus*) dalam pembuatan media; (2) *Komponen 4: Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan*: kesesuaian mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikan, peningkatan penguasaan guru terhadap materi pelajaran serta pola pikir keilmuan, dan guru harus mengembangkan model pembelajaran interaktif dan inovatif; (3) *Komponen 6: Standar Pengelolaan Pendidikan*: melakukan sosialisasi terhadap visi, misi, dan tujuan sekolah, merumuskan rencana kerja tahunan maupun yang berjangka menengah dan disosialisasikan, membuat struktur organisasi yang memperhatikan kejelasan tugas masing-masing departemen, merumuskan pedoman tertulis yang mengatur berbagai aspek pengelolaan, kegiatan sekolah harus sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT), memiliki dan melaksanakan > 1 program pengelolaan kegiatan

pengembangan kurikulum dan pembelajaran, memiliki dan melaksanakan > 1 kegiatan yang dapat menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif, memiliki Sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi pendidikan baik.

Saran-Saran

- 1) Kebijakan: Perlu dilakukan reformasi kebijakan dalam penilaian kinerja guru terutama memasukkan kegiatan perencanaan pembelajaran merupakan tugas pokok yang tak terpisahkan sehingga kegiatannya diperhitungkan dalam menentukan tugas minimal 24 jam per minggu.
- 2) Manajemen Sekolah: Dalam mengimplementasikan Sistem perbaikan supervisi kegiatan guru perlu dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan pemberdayaan dan pendampingan guru dan manajemen sekolah dalam bentuk model sekolah binaan dalam kegiatan perencanaan pembelajaran, model supervisi kegiatan guru, dan kemahiran penelitian tindakan kelas.
- 3) Guru Bidang Studi: Khusus untuk guru perlu dilakukan pemberdayaan dan pendampingan dalam bentuk model sekolah binaan dalam rangka peningkatan pemahaman materi yang perolehan nilai UN rendah.
- 4) Sarana dan Prasarana: a) Kepala sekolah dan Komite Sekolah perlu menyediakan buku teks mata pelajaran sesuai dengan permendiknas untuk setiap siswa; b) Laboratorium setiap mata pelajaran perlu dirintis dan diadakan agar siswa dapat memahami materi bukan hanya pada aspek kognitif tetapi pada aspek afektif dan psikomotor; c) Kepala sekolah dan Komite Sekolah perlu menyediakan perangkat IT (*computer dan infocus*) dalam pembuatan media oleh guru.

DAFTAR PUSTAKA

Ace Suryadi. 2002. *Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan: Isu, Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Balai Pustaka.

BSNP, 2011, Laporan Hasil Ujian Nasional Tahun 2011.

Caska dkk.. 2011. Agregasi Pemetaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan di Provinsi Riau, Laporan hasil penelitian Lembaga Penelitian Universitas Riau. Pekanbaru

Dinas Pendidikan Provinsi Riau. 2001. *Masterplan Percepatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah Propinsi Riau*, Dinas Pendidikan Propinsi Riau, Pekanbaru.